

# IMPLEMENTASI SEWAKA DHARMA DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh: I Wayan Ramantha

Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar

## **Pendahuluan**

Pada pertemuan G20 yang berlangsung di Shanghai-China tanggal 26-27 Febroari 2016 yang lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan resume tentang muramnya perekonomian dunia. Pantauan IMF mengindikasikan bahwa ekonomi global cenderung melemah dan sangat rapuh terhadap berbagai macam guncangan. Pelemahan tersebut dikatakan bersumber dari peningkatan turbulensi di sector keuangan dan jatuhnya harga dari berbagai sector komoditas.

Perekonomian dunia, bila dilihat dari beberapa indicator, memang sedang mengalami kemunduran. Tanda-tanda perekonomian akan terus memburuk bisa dilihat dari berbagai fakta. China misalnya, sebagai Negara dengan perekonomian terbesar kedua dunia, saat ini sedang menuju masa keseimbangan baru dan membuat berbagai kebijakan ekstrem. Mata uang negara berpenduduk terbesar dunia itu, baru-baru ini telah didevaluasi. Impor komoditasnyapun dikurangi dalam jumlah yang sangat signifikan, karena perekonomiannya yang terlalu panas (*over heated*).

Akibatnya sudah dapat dibayangkan, harga-harga komoditas menjadi terjun bebas dan berdampak pada perekonomian negara-negara penyedia produk tersebut. Perekonomian Indonesia tentu akan terpengaruh secara signifikan. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita bergantung pada China yang memiliki permintaan tinggi terhadap berbagai komoditas, seperti batu bara dan beberapa yang lain. China yang semula pertumbuhan ekonominya selalu di atas 7 persen, kini menurun dan berada di kisaran 6 persen.

Penyebab lain dari menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia adalah merosotnya harga minyak mentah. Penurunan harga minyak lebih lanjut dapat menggoyahkan prospek dari negara-negara eksportir minyak. Dampak yang sama juga akan dirasakan oleh negara-negara pengimpor, karena akan terjadi penurunan permintaan yang pada gilirannya juga akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia. Ujung-ujungnya, harga komoditas lain juga akan ikut berguguran, tidak terkecuali harga dari produk-produk yang saat ini menjadi komoditas andalan ekspor dari Bali.

Lembaga pemeringkat ekonomi (Moody's) merilis, bahwa selain China yang menjadi episentrum guncangan ekonomi dunia, sebetulnya juga ada kontribusi Eropa dan Jepang. Bank sentral Eropa telah memberlakukan tingkat suku bunga negative yang kemudian diikuti oleh bank sentral Jepang. Banyak analis yang mengkritisi bahwa kebijakan itu tidak akan berhasil membawa perjuangan Eropa dan Jepang ke tingkat inflasi di kisaran 2 persen. Moody's juga melihat kecilnya respons atas kebijakan pemerintah Jepang dalam memerangi penurunan ekonomi. Bagi Indonesia, dengan demikian juga Bali, yang ekspor dan pariwisatanya cukup tergantung pada perekonomian Eropa dan Jepang, akan ikut merasakan dampaknya.

Dengan kondisi yang demikian, memang sudah sepantasnya prediksi makro ekonomi Bali dalam RPJMD Tahun 2013-2018 ditinjau kembali. Laju pertumbuhan ekonomi yang dipatok tumbuh mencapai 7,29 hingga 8,07 persen tahun 2017 perlu dihitung kembali. Memperhatikan kondisi global dan nasional terkini, target pertumbuhan ekonomi Bali Tahun 2017 akan lebih realistis bila dipatok di kisaran angka 6,50 hingga 7,00 persen.

Sebagai bagian terpenting dari ekonomi regional Bali, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tidak akan luput dari kondisi ekonomi global, nasional dan juga regional Bali. Kalau tahun depan kita berani memasang target 0,25 persen di atas pertumbuhan ekonomi Bali, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar akan ada pada kisaran 6,75 hingga 7,25 persen pada Tahun 2017 nanti.

### **Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Nasional**

Di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti yang telah terungkap sebelumnya dan divergensi kebijakan moneter bank sentral di sejumlah negara utama dunia, atas himbauan pemerintah, Bank Indonesia (BI) memilih kebijakan moneter yang longgar. Menurut catatan (Kompas, 26/2/16) dalam dua bulan berturut-turut, suku bunga acuan BI turun. Bahkan ketentuan giro wajib minimum primer diturunkan secara signifikan.

Rapat Dewan Gubernur BI pertengahan Februari 2016 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI *Rate*) sebesar 25 basis poin hingga menjadi 7 persen. Kebijakan itu melanjutkan kebijakan pelonggaran pada bulan sebelumnya, dari 7,5 persen menjadi 7,25 persen. BI juga melengkapi kebijakannya dalam bentuk penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 100 basis poin menjadi 6,5 persen. Langkah itu melanjutkan kebijakan November 2015 yang menurunkan 50 basis poin

menjadi 7,5 persen. GWM primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara bank dalam bentuk rekening giro di BI berupa persentase dari rata-rata dana pihak ketiga bank pada dua minggu sebelumnya.

Penurunan GWM akan langsung mempengaruhi suku bunga kredit dan perekonomian nasional. Dengan tambahan likuiditas, bank komersial tidak perlu menaikkan suku bunga deposito untuk mempertahankan posisi likuiditas aman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Indonesia, dengan demikian akan memasuki momentum pertumbuhan ekonomi yang baru, setelah periode pelambatan berakhir pada triwulan II-2015. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV-2015 mencapai 5,04 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun menjadi 4,79 persen. Hal ini mengkonfirmasi bahwa arah pertumbuhan ekonomi nasional sudah sedikit membaik.

Ekonom UGM A. Tony Prasetyantono, menilai kebijakan pemerintah yang begitu getol untuk segera menurunkan suku bunga, merupakan langkah di luar mekanisme pasar. Menurut dia, paling tidak akan ada empat kendala yang akan menghadang kebijakan mulia penurunan suku bunga. *Pertama*, kondisi inflasi yang belum tentu stabil. Suku bunga tabungan oleh bank tentu harus ditetapkan lebih tinggi daripada inflasi, agar deposan masih mendapatkan insentif riil berupa margin bunga.

*Kedua*, suku bunga kredit dibawah 10 persen saat ini sudah terjadi pada kredit korporasi yang flafonnya di atas Rp 200 miliar. Sementara kredit konsumsi dan kredit untuk UMKM bunganya masih tinggi, bahkan masih ada yang di atas 20 persen. Sulit untuk dibayangkan bila secara mendadak suku bunga bank secara keseluruhan harus disesuaikan dengan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipatok 9 persen. Jika suku bunga kredit secara keseluruhan ada di angka satu digit, termasuk untuk UMKM, dikhawatirkan tidak ada lagi bank yang tertarik membiayai UMKM mengingat pada sektor ini risiko pembiayaannya lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan korporasi.

*Ketiga*, ekspansi KUR dengan suku bunga 9 persen tahun ini yang ditarget mencapai Rp 100 triliun di seluruh Indonesia. Jumlah ini sangat fantastis untuk UMKM. Namun masalahnya, tidakkah hal ini otomatis bakal mengganggu kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang saat ini masih meyalurkan kredit dengan bunga di kisaran 18 hingga 21 persen?. Terlebih bagi industri perbankan di Bali yang hingga saat ini beroperasi 138 buah BPR dengan total asset mencapai Rp 10 triliun lebih. Demikian juga halnya dengan operasional 1.438 buah Lembaga Perkreditan Desa

(LPD) yang mengelola asset hingga Rp 15 triliun. Bisakah mereka akan menyesuaikan diri dengan KUR bank umum?

*Keempat*, persoalan menjadi kian kompleks tatkala pemerintah harus membiayai deficit APBN dengan menerbitkan surat utang atau obligasi pemerintah. Tahun 2016 kekurangan penerimaan pajak diperkirakan bisa menembus Rp 290 triliun. Ketika pemerintah menerbitkan obligasi dalam jumlah besar, yang terjadi adalah imbal hasilnya tidak bisa rendah. Jika *yield* obligasi pemerintah lebih rendah daripada bunga deposito perbankan, dia akan sepi peminat karena tingkat keamanannya hampir sama.

Beberapa hal seperti tersebut di atas, tampaknya akan menjadi kendala utama penurunan suku bunga kredit di tanah air menjadi satu digit pada tahun ini. Dalam kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi Bali, nampaknya memberi arah kepada kita untuk tidak terlalu optimistis. Bahwa penurunan tingkat suku bunga memang penting untuk dilakukan, namun dia tidak akan secara mendadak dapat meningkatkan pertumbuhan PDB negeri ini, dan PDRB Bali tanpa kendala apapun.

Kondisi lain yang menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi kita adalah sulitnya investasi terealisasi, baik asing maupun dari dalam negeri. Pada tahun 2016 ini Indonesia masih menduduki peringkat 109 dari 189 negara dalam bidang kemudahan berusaha (*ease of doing bussines*). Bila dibandingkan dengan level ASEAN saja, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam seperti yang diungkap oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI baru-baru ini pada sebuah pertemuan di Kabupaten Badung.

Fakta tersebut memang pantas untuk direnungkan. Pasalnya, dibanding Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, memang Indonesia tertinggal jauh. Singapura penempati ranking 1, Malaysia peringkat 18, Thailand peringkat 49 dan Vietnam peringkat 70. Menurut MenPAN & RB, tertinggalnya Indonesia di berbagai bidang dan indikator karena tidak efisien dalam birokrasi. Kemudahan berusaha sangat terhalang, karena berbelitnya birokrasi hingga ke tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Sementara berdasarkan data *The World Wide Governance Indicators*, rata-rata indeks efektivitas Pemerintah Indonesia juga sangat rendah. Pada tahun 2014 yang lalu, Indonesia menempati peringkat 85. Lagi-lagi kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Fakta-fakta ini pasti signifikan dampaknya terhadap minat

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sementara investasi sangat linier dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, naik turunnya pertumbuhan PDB suatu Negara dan PDRB suatu Daerah, sangat ditentukan oleh besar-kecilnya investasi yang tertanam.

Namun demikian, bukan berarti sama sekali tidak ada kebijakan yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Beberapa paket kebijakan yang secara maraton terus dikeluarkan oleh pemerintah pusat, akan menjadi stimulus yang berarti bagi pelaku ekonomi di negeri ini. Fokus utama dari paket kebijakan ekonomi adalah kebijakan deregulasi untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya penegakan hukum dan kepastian usaha yang menjadi beban daya saing industri. Adapun sarannya adalah peningkatan ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional.

Paket Kebijakan I, melakukan deregulasi 89 peraturan yang antara lain berupa relaksasi persyaratan pemberian visa, penyesuaian harga untuk industri tertentu dan peningkatan fungsi koperasi. Pada paket ini juga dilakukan penyederhanaan pembuatan izin usaha dan implementasi e-service, penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penguatan peran pemerintah daerah dalam percepatan proyek strategis nasional, perluasan kesempatan untuk investasi di sector properti dan mendukung perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Paket Kebijakan II, memberikan kemudahan untuk mengeluarkan izin investasi dalam 3 jam, mempercepat pengurusan keringanan pajak dan bebas pajak sementara (*tax allowance and tax holiday*), dan mempercepat izin investasi sector kehutanan. Paket ini juga memberikan insentif pajak dalam bentuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pengadaan alat transportasi seperti galangan kapal, kereta api, pesawat terbang dan termasuk suku cadangnya.

Paket Kebijakan III, menurunkan harga BBM, listrik dan gas. Untuk harga gas diberlakukan penurunan untuk industry tertentu, sedangkan untuk tarif listrik dilakukan penurunan untuk seluruh jenis industry. Pada paket ini juga dilakukan penyederhanaan izin penanaman modal seperti memberikan informasi ketersediaan lahan dalam 3 jam, percepatan waktu persetujuan pembangunan gedung. Dan pada paket ini pula dikeluarkan kebijakan untuk memperbanyak wirausahawan dengan cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk kepada keluarga yang berpenghasilan tetap.

Paket Kebijakan IV, mengatur sistem pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi. Paket ini juga mengatur perluasan pemberian KUR dengan bunga yang lebih murah. Penerima KUR adalah individu atau perorangan yang meliputi UMKM yang produktif, calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap, dan TKI purna. Usaha produktif yang dibiayai termasuk, pertanian, perikanan dan perdagangan.

Paket Kebijakan V, mengatur deregulasi pajak untuk revaluasi asset, menghilangkan pajak berganda dana investasi untuk real estat, properti dan infrastruktur. Memperkenalkan produk baru dalam pasar modal, skema pajak baru untuk produk pasar modal tertentu (kontrak investasi kolektif-dana investasi real estat). Dalam paket ini juga dilakukan deregulasi di bidang perbankan syariah. Dengan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah berharap ada pengembangan produk dan perluasan bisnis bank syariah.

Paket Kebijakan VI, mengatur penggerakan ekonomi pinggiran melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyediaan air secara berkelanjutan dan berkeadilan, serta percepatan (*paperless*) izin impor bahan baku obat. Paket Kebijakan VII, mengatur pencegahan pemutusan hubungan kerja pada industry padat karya dengan memberikan keringanan PPh 21 selama 2 tahun. Pada paket ini juga mengatur pemberian tax allowance bagi industry tekstil, produk tekstil dan alas kaki untuk mendorong industry padat karya. Mendorong pengembangan profesi juru ukur agar mempercepat sertifikasi lahan.

Paket Kebijakan Ekonomi VIII, menyangkut kebijakan satu peta pada tingkat nasional dengan skala 1:50.000, membangun ketahanan energy melalui percepatan pengembangan dan pembangunan kilang minyak di dalam negeri, dan ketiga terkait insentif penerbangan nasional untuk perusahaan jasa pembelian pesawat. Paket Kebijakan Ekonomi IX, bertumpu pada percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilitas harga daging dan peningkatan sector logistic desa-kota.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi X, berfokus pada peningkatan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI). Pada kebijakan ini pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK melalui revisi Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal.

Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana tindak lanjut dan sinkronisasi kesepuluh paket kebijakan itu di tingkat daerah, baik di tingkat Provinsi Bali maupun di tingkat Kota Denpasar ?. Beranikah dengan spirit Sewaka Dharma yang sudah cukup lama dipedomani di Denpasar, kita menjanjikan izin usaha pasti keluar dalam hitungan waktu 3 jam seperti paket kebijakan yang dibikin oleh pusat ? Bagaimanapun juga, semua paket kebijakan ekonomi pusat, baru akan mampu memutar roda ekonomi Denpasar secara lebih cepat, bila ada tindak lanjut yang sejalan di daerah ini.

### **Kesimpulan**

Dengan mencermati berbagai kondisi lingkungan strategis eksternal yang akan mempengaruhi ekonomi Kota Denpasar, baik kondisi ekonomi global maupun nasional dan berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat, target pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2017 dapat diproyeksi di kisaran 6,75 hingga 7,25 persen. Semangat mengimplementasikan Sewaka Dharma, agar lebih membumi, menjadi kata kunci guna memutar roda ekonomi Kota ini ke arah yang lebih baik. Bila penyesuaian segera dilakukan, Denpasar akan menuju era *new normal growth* yang lebih berarti bagi kebahagiaan masyarakatnya.